LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
DINAS PERHUBUNGAN

2024

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap berakhirnya tahun anggaran diwajibkan setiap SKPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Indikator Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin SKPD kepada atasannya, untuk mengetahui akuntabilitas instansi baik dari segi kinerja maupun keuangan dan merupakan laporan pertanggunjawaban SKPD terhadap tugas – tugas yang diembankan kepadanya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga laporan ini akan menjadi sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malili, 1 April 2024

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM, S.Sos, MM

NIP. 19651105198703101 5

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi .....Hal 1
2. Bidang Kewenangan .....Hal 1
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....Hal 2
4. Struktur Organisasi .....Hal 3

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi .....Hal 6
2. Tujuan, Sasaran dan Kebijkan Pembngunan.....Hal 7
3. Rencana Kinerja PD .....Hal 10

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja ..... Hal 14
2. Realisasi Anggaran ..... Hal 46

BAB IV Penutup..... **Hal 71**

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaaan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024, laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan stratejik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya..

4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
   Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
   Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
   Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum.
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
   Seksi Terminal dan Perparkiran;
   Seksi Angkutan.
5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
   Seksi Kepelabuhanan; dan
   Seksi Transportasi Danau dan Sungai.

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur OrganisasiDinas Perhubungan

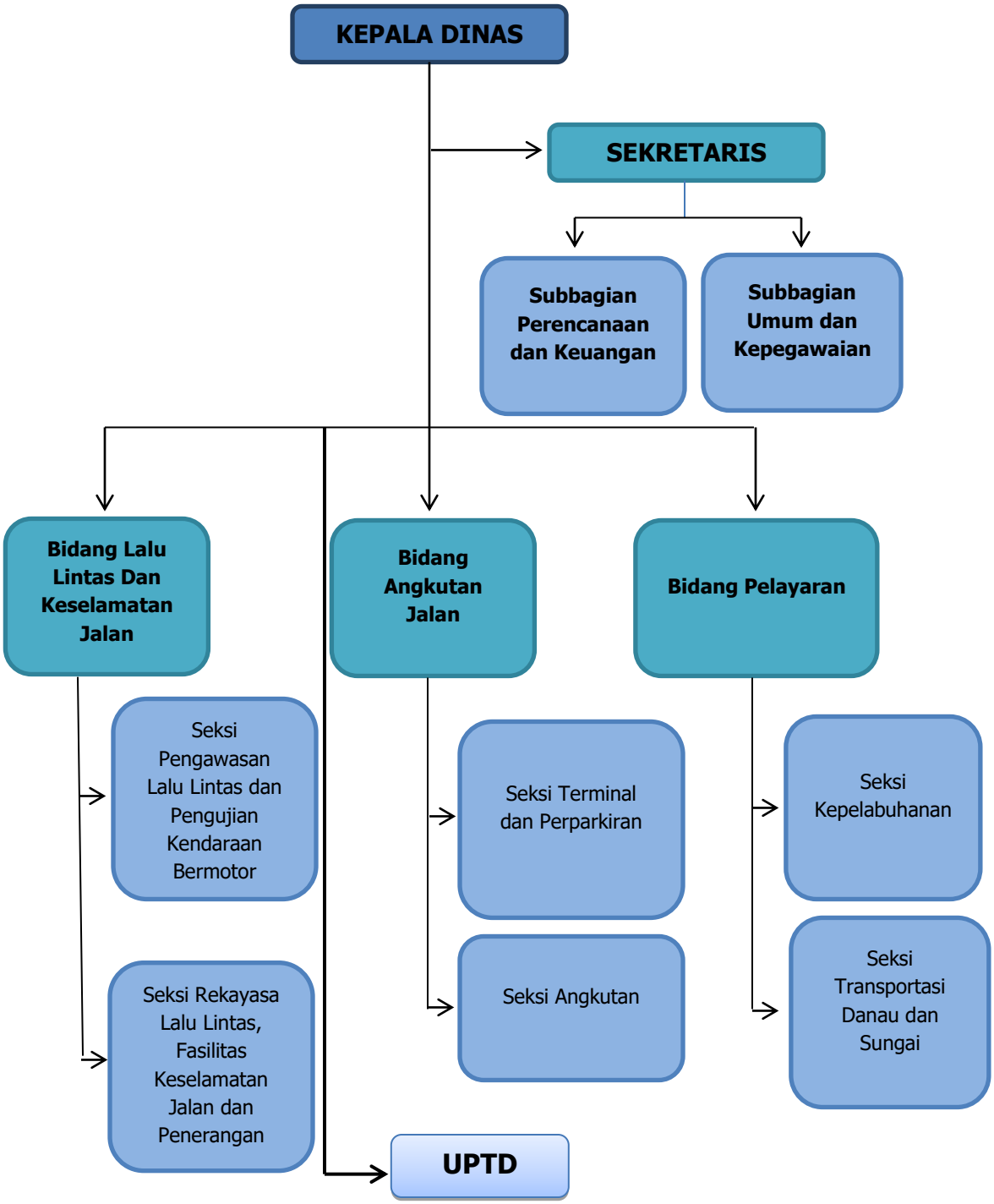

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan susunan organisasi diatas, Dinas Perhubungan memiliki pegawai berjumlah 84 orang, terdiri dari 27 PNS dan 63 upah jasa. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada table sebagai berikut :

Gambar 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

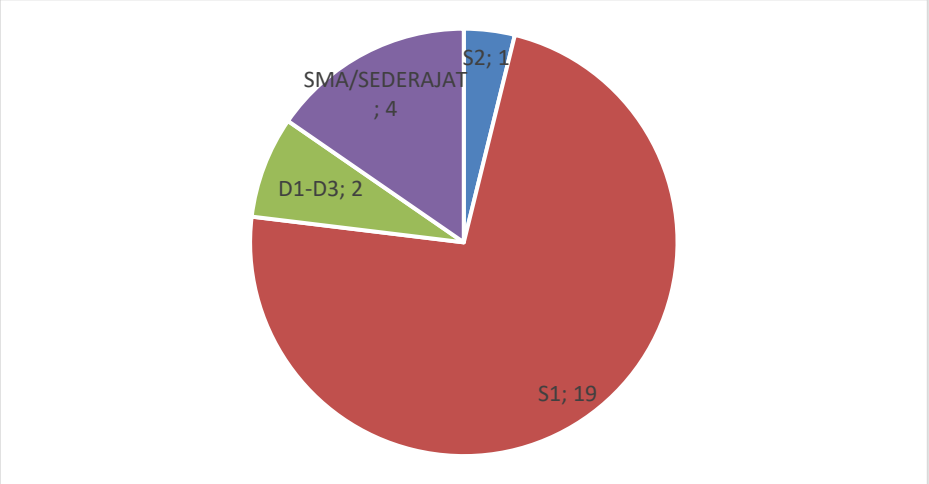

Tabel 1.1

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina, IV/a	3
3	Penata Tk.I, III/d	6
4	Penata, III/c	5
5	Penata Muda Tk.I, III/b	4
6	Penata Muda, III/a	2
7	Pengatur, II/d	2
8	Pengatur Muda Tk.I, II/c	2
9	Pengatur Muda, II/b	1

Gambar 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Eselon

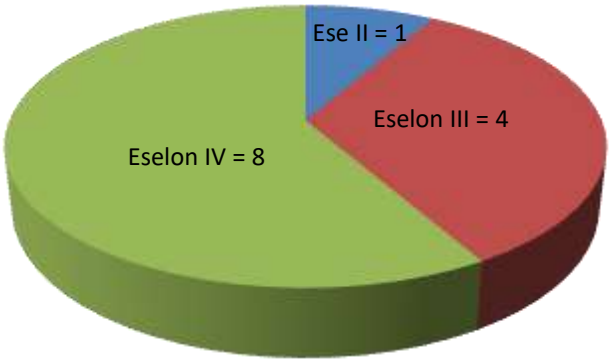

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar berkonsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perhubungan haruslah juga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai suatu tugas untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman akan misi, maka dapat diharapkan unsur dalam sistem transportasi mampu berinteraksi untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun misi Dinas Perhubungan mengacu pada 2 misi yaitu:

Misi 3	• Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
Misi 4	• Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan RENSTRA Dishub 2021 – 2026

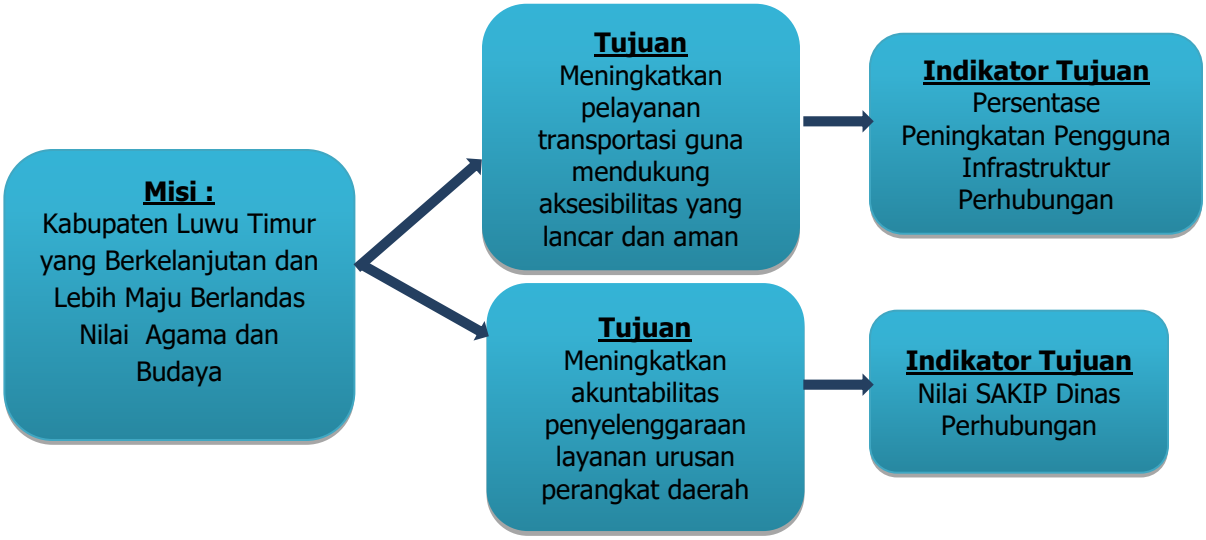

2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaranorganiasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan

dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman								
SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi								
Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77
SASARAN 2: Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi								
Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) /(Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,13
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan								
SASARAN 2: Menigkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan								
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar dan objek wisata yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah	Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik
			Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi
	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga menciptakan ketertiban dan keselamatan pengoperasian angkutan umum	Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT

Misi : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakaan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target

3. RENCANA KINERJA SKPD

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok

3.1 Program

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 2 Program Urusan Perhubungan dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Urusan Perhubungan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan ('%)	(Jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang terbangun/jumlah sarana dan prasarana LLAJ yg seharusnya ada)*80%+(Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang/jumlah rambu lalu lintas yang seharusnya ada)*20%	%	45,08%	52,46%	67,37%	79,90%	90,93%	100,00%
Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman dan nyaman	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan ('%)	Rencana Kendaraan yang lolos uji (laik jalan)/Rencana Jumlah Kendaraan wajib uji	%	94,07%	94,24%	94,41%	94,57%	94,73%	94,88%
	Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji (%)	(Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji yang tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n)*100%	%	0	0	0	0,27	0,20	0,13
Program Pengelolaan Pelayaran									
Terciptanya pelayaran kapal yang aman dan nyaman	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut ('%)	Jumlah kapal yang beralamat Kabupaten Luwu Timur yang memiliki izin layar /jumlah kapal yang berlayar yang beralamat Kabupaten Luwu Timur	%	22,17%	27,17%	31,98%	36,57%	40,86%	45,18%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (‘%)	Jumlah kapal yang beroperasi di danau yang memiliki izin/jumlah kapal yang beroperasi di danau	%	12,50%	25,00%	43,75%	68,75%	87,50%	100,00%
Program Pengelolaan Penerbangan									
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan bandara	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	Jumlah penumpang angkutan udara tahun-n	orang	6137	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (‘%)	Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala SKPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja SKPD.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 yang dibuat Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Target TW 1
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,67	0,63
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83,81%	19,84%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,27	0,27
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	-

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang perhubungan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan. Laporan Kinerja triwulan 1 ini memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan dan target per triwulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tren capain tiap – tiap program setiap triwulan. Sehingga akan didapatkan data program – program yang capaiannya telah mendekati target maupun yang belum mendekati target. Setiap capaian kinerja akan dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabuapaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 4 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten
2. Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
4. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Tabel A
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 Triwulan 1

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabuapaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,67	0,63	0,63	100,00%
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83,81%	20,92%	28,85%	137,91%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,27	0,27	0	200,00%
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	-	-	-

I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi
Indikator : Rasio Konektivitas Kabupaten

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan yang mana telah dilakukan beberapa kali penyesuaian, memiliki sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Kabupaten Luwu Timur yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Berikut merupakan formulasinya

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektvitas kabupaten (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyebrangan) = jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pd Kebupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Keterangan :

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan sungai, danau, penyebrangan)

- Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antara wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyebrangan

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bonot ngkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
b. Bobot trayek lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), = 0.8
c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut}}$$

$$= \frac{7 \times 1}{15}$$

$$= 0{,}467$$

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten x bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lntas penyeberangan pada kabupaten}}$$

$$= \frac{8 \times 1}{8}$$

$$= 1$$

Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30
(sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

= (0,467 x 70%) + (1 x 30%)
= 0,33 + 0,3
= 0,63

Rasio Konektivitas 0,63 artinya sebayak 0,63 atau 63% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan.

Nilai terget sebesar 0,63 merupakan capaian tahun sebelimnya, karena pada triwulan 1 Tahun 2024 belum ada peningkatan dimana ditargetkan penambahan 1 trayek namun bellum ada realisasi

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Triwun 1 Tahun 2024

Indikator	Formula		Target 2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian
Rasio Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) =(0,333*70%) + (1*30%)		0,67	0,63	0,63	100 %
	IK1		0,53	0,47	0,47	
	Bobot angkutan jalan		70%	70%	70%	
	IK2		1	1	1	
	Bobot bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan		30%	30%	30%	
	IK1 (angkutan jalan)	Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	0,53	0,47	0,47	
		Jumlah trayek yang dilayani	8	7	7	
		Bobot trayek	1	1	1	
		Jumlah Kebutuhan trayek	15	15	15	

Indikator	Formula		Target 2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian
	IK 2 (Angkutan sungai, danau, penyebrangan)	jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pd Kebupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada Kabupaten/Kota tersebut)	1	1	1	
		Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi	8	8	8	
		bobot lintas	1	1	1	
		Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan	8	8	8	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Tw 1	Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,63	0,63	0,63	100,00%

Rasio Konektivitas Kabupaten dengan pada triwulan 1 Tahun 2024 di target sebesar 0,63 karena pada triwulan 1 masih dalam tahap perencanaan atau persiapan penambahan trayek baru, sehingga realisasi juga 0,63 sama seperti realisasi pada tahun 2023.

Rasio Konektivitas 0,63 artinya sebayak 0,63 atau 63% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan. Semakin tinggi rasio konektivitas angkutan jalan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Capaian Kinerja Thn 2023		Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target TW 1	Real		Target TW 1	Real		Target TW 1	Real	
1	*2*	*9*	*6*	*8*	*9*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,3	0,3	100%	0,4	0,4	100%	0,63	0,63	100%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat dan realisasinya sesuai dengan target sehingga capaian kinerja setiap tahun sebesar 100%

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024(%)
		Target TW 1	Real		Target	Real	
1	*2*	*9*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,4	0,4	100%	0,63	0,63	100%

Untuk capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian Rasio Konektivitas Kabupaten

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,77	0,63	81,74%

Perbandingan realisasi triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021 -2026 adalah sebesar 81,74% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2024 TW 1	Realisasi Target Kabupaten TW 1	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,57	0,63	110,53%

Target Rasio konektivitas Kabupaten untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,63 sedangkan untuk Rasio Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional sebesar 0,57 dimana capaian Kab. Luwu Timur sebesar 110,53 %

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.7

Realisasi Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	*2*	*6*
1	Rasio konektivitas Kabupaten	100%

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja*

   Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

   - Pembangunan Terminal

     Dengan terbangunnya Terminal Malili dan Terminal Tarengge maka diharapkan Segala aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan,menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal.
   - Pengoperasian dan pemeliharaan Bus Sekolah

     Dengan adanya 27 unit bus sekolah yang melayani 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur maka akses anak sekolah untuk pergi dan pulang sekolah lebih mudah dan aman.
   - Rekomendasi izin trayek

     Dengan adanya rekomendasi izin trayek maka angkutan umum dapat mengurus pembuatan atau perpanjangan izin trayek sehingga semua angkutan umum penumpang yang beroperasi di Kabupaten Luwu timur memilik trayek tetap
   - Pengawasan terhadap trayek yang dilayani

     Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan, serta untuk mengetahui

faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
  Dengan beroperasi dan terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau maka akses pengguna fasilitas pelabuhan akan lebih mudah dan aman
- Penatapan Trayek Penyeberangan

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*
   Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :
   - Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga aktivitas yang dilaksankaan di Terminal tersebut belum maksimal
   - angkutan umum yang tidak memperpanjang maupun mengurus izin trayek, dimana hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas karena syarat angkutan umum dapat beroperasi adalah berbadan hukum atau badan usaha.
   - maraknya kendaraan plat gantung beroperasi laiknya kendaraan umum yang sah
3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*
   Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :
   - Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya
   - Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum, sehingga hal ini merugikan angkutan penumpang umum lainnya, karena akan mempengaruhi jumlah penumpang yang diangkut serta pendapatan pemilik kendaraan.

G. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Gedung Terminal	1.855.000.000	50.625.000	-	**0,00%**
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	708.560.000	185.734.000	49.310.000	26,55%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30.814.900	12.412.000	640.000	5,16%
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.354.544.300	595.222.850	426.324.660	71,62%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	82.321.750	21.975.000	7.853.714	35,74%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 beberapa sub kegiatan belum ada realisasi yaitu :

a. Pembangunan Gedung Terminal di targetkan Rp. 50.625.000, anggaran ini merupakan anggaran Perencanaan Pembangunan Terminal Malili, namun pada Triwulan I belum terealisasi karena masih dalam tahap pemilihan penyedia

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar 5,16% dari target triwulan 1 karena dokumen pertanggungjawaban yang belum disusun sehingga tidak ada realisasi keuangan.

H. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal Malili dan Tarengge maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan,menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas manikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3.1 Pembangunan Terminal Malili & Terminal Tarengge Tahun 2023

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan dan pengelolaan tempat Parkir untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan untuk mengurangi parkir liar.

c. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya, selama triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 97.900 siswa dan siswi SMP dan SMA Kabupaten Luwu Timur diangkut oleh Bus Sekolah setiap hari. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 27 unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
bertujuan untuk mengupayakan tersedianya pelayanan jasa angkutan orang dengan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak terjadwal berupa trayek.
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengurusan izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksankan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.
Pada tahun 2024 jumlah penumpang dan barang yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadual yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

II. Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator 1 : Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 1 tahun 2024 sebesar 137,91% dengan realisasi sebesar 28,85% dihitung sesuai dengan jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :
= ((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) /(Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)
= ((1230/4263)x100%)
= 28,85%

Indikator 1 mengukur keselamatan dan keamanan dari ketersediaan angkutan umum orang dan barang yang laik beroperasi, meningkatkan keselamatan transportasi angkutan di darat, laut dan danau. Dimana keselamatan dalam bertransportasi dapat terwujud apabila sistemnya (orang, kendaraan dan aturan) dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di kendaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan langkah – langkah melalui pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan wajib uji dan memfasilitasi pengurusan pas kapal laut dan danau sehingga kapal yang beroperasi memiliki izin operasi
Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus laik jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud.Agar dapat diciptakan kondisi pemenuhan terhadap pesryaratan di atas, maka dilakukanlah apa yang dinamakan pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan pengujian kendaran bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek apakah kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Kegiatan pengujian kendaraan

bermotor dilakukan secara periodik per-setiap 6 (enam) bulan sekali.
Sedangkan untuk mewujudkan lalu lintas kapal di laut dan di danau yang aman, maka dilaksankan kegiatan peningkatan skill pengemudi kapal dan fasilitasi perijinan kapal
Pada triwulan 1 tahun 2024 Capaian target indikator 1 mencapai 137,91% dimana dilakukan pengujian kendaraan dan sebanyak 1.121 unit angkutan penumpang umum dan angkutan barang dianggap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, 34 unit Kapal di danau yang laik berlayar serta 75 unit kapal di laut yang laik berlayar. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor terutama pengujian kendaraan yang dilakukan secara efektif, yakni tenaga penguji yang meskipun masih kekurangan personil tetapi dapat bekerja handal dan profesional. Fasilitas dan perlengkapan pengujian yang cukup lengkap melalui pengadaan alat uji sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemeliharaan secara rutin serta Kalibrasi terhadap alat pengujian. Perbaikan prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan juga mendukung dalam pencapaian target.

Tabel 3.9
Tabel Capaian Jumlah angkutan umum
yang memiliki izin laik operasi

No.	Uraian	Jumlah	Target 2024		Target TW 1		Realisasi TW 1	
			Yang berizin	%	Yang berizin	%	Yang berizin	%
1	Kendaraan Wajib Uji (Darat)	3160	3135	99,21%	783	24,98%	1121	143,17%
2	Kapal di Laut	957	300	31,35%	75	25,00%	75	100,00%
3	Kapal di Danau	146	138	94,52%	34	24,64%	34	100,00%
	TOTAL	4263	3573	83,81%	892	20,92%	1230	28,85%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024

Tabel 3.10

Capaian Target Sasaran 2 Indikator 1

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2024	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83,81%	20,92%	28,85%	137,91%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 1 tahun 2024 sebesar 137,91% dengan realisasi sebesar 28,85%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target Tw1	Real		Target Tw1	Real		Target Tw1	Real	
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	19,42%	24,99%	128,68%	19,84%	23,60%	118,95%	20,92%	28,85%	137,91%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi Triwulan 1 Tahun 2023 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat, pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 128,68% ,pada tahun 2023 capian triwulan 1 sebesar 118,95% dan pada tahun 2024 capaian triwulan 1 137,91%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	19,84%	23,60%	118,95%	20,92%	28,85%	137,91%

Untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 118,95% dan Tahun 2024 sebesar 137,91%, ini berarti ada peningkatan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 18,95%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Sat**	**Target Renstra 2021-2026**	**Realisasi Target Sampai Tw 1 2024**	**Capaian Kinerja (%)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83.32%	28,85%	34,63%

Perbandingan realisasi Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 34,63% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja*

   Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

   - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

     Pengujian kendaraan bermotor dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 1 unit kendaraan wajib uji. Pada tahun 2024 mulai bulan Januari sampai bulan Maret dilakukan 1.121 kali pengujian kendaraan bermotor.
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

     Pemeliharaan terhadap 11 unit alat pengujian untuk mengkalibrasi menguji keakurasian alat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga dilakukan penggantian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan.
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

     Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota

     Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 13 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukurkan kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang tekah dimutakhirkan.
   - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2023 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 16 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*

   Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

   - Kurangnya Sumber Daya manusia khususnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kondisi saat ini hanya terdapat 3 orang yang bersertifikat sesuai dengn jenjang masing-masing, dimana 2 orang berststus PNS dan 1 orang upah jasa, jika dibandingkan dengan jumlah pengujian yang dilakukan setiap harinya, maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target kinerja. sehingga diharapkan adanya penambahan personel Penguji Kendaraan Bermotor
   - Angkutan umum yang tidak tertib dalam megurus dan memperpanjang bukti lulus uji
   - Pada tahun 2023 jumlah kapal yang telah difasilitasi sebanyak 252 unit dari target 300 unit atau sebesar 84,02% hal ini terjadi karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kantor Syahbandar sehingga tidak dapat melakukan pengukuran kapal terhadap kapal yang telah difasilitasi pengurusan ijinnya
   - Pemilik kapal yag kurang aktif dan cenderung malas melakukan pengurusan surat izin berlayar

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

   Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

   - Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
   - Mengajukan ke BKPSDM Kabupaten Luwu Timur untuk membuka formasi penerimaan CPNS atau PPPK untuk Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.

- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

F. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	167.278.000	99.436.500	13.925.000	14,00%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.000.000	3.000.000		0,00%
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	446.251.800	149.594.200	66.374.000	44,37%
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	4.235.500		0,00%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	249.336.900	56.310.875	11.055.000	19,63%
6	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	367.798.250	81.458.350	46.180.000	56,69%
7	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	44.000.000	36.000.000		0,00%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 1 maka terlihat masih ada sub kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan 1

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Angkutan umum yang aman dan nyaman dan laik jalan adalah angkutan umum yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melalui Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman sebesar 143,17% meningkat dari tahun sebelumnya. Pada triwulan 1 tahun 2024 dilakukan uji kendaraan terhadap 1.121 unit kendaran dan dinyatakan lulus uji.

b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukurkan kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang tekah dimutakhirkan.

b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksankan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada triwulan 1 tahun 2024 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 34 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

Gambar 3.2
Pengawasan Aktivitas Pelabuhan

Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi
Indikator 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Rasio kejadian kecelakaan transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah Perbandingan kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dengan jumlah kecelakaan angkutan wajib uji.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 :
= (Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/
jumlah kejadian angkutan wajib uji tahun n)
= ((0/5)x100%)
= 0

Indikator 2 mengukur keselamatan dan keamanan dari Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji. Semakin rendah Rasio Kejadian

Kecelakaan Transportasi maka makin sedikit kendaraan wajib uji yang kecelakaan karena kendaraan tersebut tidak lai jalan.

Tabel 3.15
Tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Triwulan 1 Tahun 2024

No	Uraian	2024
1	Jumlah Kecelakaan	5
2	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	2
3	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum Barang	3
4	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Rusak	0
5	Jumlah Kecelakaan Karena Karena Rambu-Rambu Lalu Lintas	0
6	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Kendaraan	0

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Tw 1	Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0	0,27	0	200%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 1 tahun 2024 sebesar 200% dengan realisasi sebesar 0 dari target 0,27. Target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah target menurun jadi semakin kecil realisasi semakin baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwuln 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023, dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0	0	100%	0	0	100%	0,27	0	200%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah 100% hal ini karena indikator ini merupakan indikator baru hasil dari perbaikan setelah coaching dengan tim dar Kemenpan RI, jadi tidak ada penetapan target untuk yahun 2022-2023 namun untuk realisasi sebesar 0% atau selama tahun 2022 dan 2023 tidak ada kendaraan wajib uji yang mengalami kecelakaan yang disebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan tetapi karena faktor manusia atau pengemudinya serta faktor lingkungan atau cuaca.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0	0	100%	0,27	0	200%

Untuk capaian kinerja tahun 2023 capaian sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 200%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2024	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	0,13	0	200%

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 200% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis realisais tersebut akan tetap bertahan sampai akhir renstra.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2024	Realisasi Target Kabupaten	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	16,24	0,000005	199,99%

Untuk target Nasional tentang Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kementerian Perhubunganmenetapkan target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan,sehingga jika dibandingkan dengan target Kabupaten Luwu Timur maka perhitungannya adalah membandingkan Jumlah Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji dibagi 1.000.000 keberangkatan

Rumus Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan
= Jumlah Kejadian Kecelakaan/1.000.000 keberangkatan
= 5/1.000.000
= 0,000005
Bila dilihat perbandingannya maka Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan di Kabupaten Luwu Timur lebih kecil karena dalam lingkup yang kecil.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.21
Capaian Realisasi Sasaran 2 Target 2

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	*2*	*6*
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	100%

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja*
   Penyebab keberhasilan capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah :
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukanpemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin.
   - Membangun Koordinasi dan Komunikasi dengan instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Agar terjadi keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang yang masih dalam tahap perencanaan, belum ada realisasi fisik
- Angkutan umum yang tidak tertib berlalu lintas
- Belum optimalnya Koordinasi dan Komunikasi stake holder terkait dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan

L. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.975.400.000	-		
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.604.419.250	1.021.850.000	977.106.801	95,62%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 2 maka terlihat rata-rata capaian realisasi Penyediaan Perlengkpana

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota belum ada realisasi karena pada triwulan 1 masih pada tahap pemilihan penyedia

M. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi pemasangan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum warning light, traffic light dan halte bus sekolah dengan capaian 100% dimana perlengkapan jalan yang disediakan berfungsi dengan baik, uraian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan namun masih dalam tahap pemilihan penyedia
b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukanpemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin

III.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan

Indikator : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 berdasarkan Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 Triwulan 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target TW 1	Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	79,85	-	-	

Realisasi SAKIP tahun 2024 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2024 dan belum ada peniliaian di triwulan I.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.24
Capaian Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %
1	*2*	*3*
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	108,96%

1. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja*
   Walaupun belum ada peniliaian nilai SAKIP Dinas Perhubungan namun tetap diambil langkah – langkah untuk mencapai peningkatan nilai SAKIP sebagai berikut:
   - Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan
   - Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik
   - Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
   - Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
   - Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
   - Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bapelitbangda, Bagian Organisasi)

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*
   Penyebab kegagalan capaian indikator sasaran 3 yaitu :
   - Untuk realisasi tahun 2024 akan menyesuaikan dengan hasil rekomendasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2023

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*
   Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 3 dengan yaitu :

- Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun

C. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.25

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.524.650	9.619.000	2.000.000	20,79%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.782.150	-		#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.965.750	930.000		0,00%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.513.150	11.662.500	5.070.000	43,47%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.900.764	1.590.451.350	543.954.277	34,20%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.438.800	17.915.000		0,00%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.451.100	3.450.000		0,00%
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.522.800	2.085.000		0,00%
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.523.050	5.567.500		0,00%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.520.000	21.000.000	3.626.000	17,27%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.543.000	1.385.750	1.381.000	99,66%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.935.700	1.691.425		0,00%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.993.350	11.748.300	6.308.100	53,69%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.429.850	4.857.470	350.000	7,21%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	2.055.000	1.660.000	80,78%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.450.000	2.612.500	2.025.000	77,51%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.042.000	138.000.000	102.588.000	74,34%
18	Pengadaan Mebel	14.000.000	14.000.000		
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.250.000	113.250.000		
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	#DIV/0!
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.150.000	5.787.500	760.000	13,13%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.222.300	12.443.600	11.719.888	94,18%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	13.200.000	8.000.000	60,61%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.920.000	3.750.000		0,00%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.450.000	125.737.500	2.090.000	1,66%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	3.915.000		0,00%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	-		#DIV/0!

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3 indikator 1 maka terlihat rata-rata beberapa sub kegiatan belum maksimal dalam realisasi keuangan

D. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada.

A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.26

Realisasi Anggaran Triwulan 1 Tahun 2024 Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Perhubungan	**18.636.939.064**	**4.434.968.670**	**2.290.301.440**	**51,64 %**	**2.144.667.230**	**48,36 %**	**16.346.637.624**	**87,71 %**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.602.208.414**	**2.117.114.395**	**691.532.265**	**32,66 %**	**1.425.582.130**	**67,34 %**	**3.910.676.149**	**84,97 %**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**87.785.700**	**22.211.500**	**7.070.000**	**31,83 %**	**15.141.500**	**68,17 %**	**80.715.700**	**91,95 %**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.524.650	9.619.000	2.000.000	20,79 %	7.619.000	79,21 %	28.524.650	93,45 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.782.150	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	2.782.150	100,00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.965.750	930.000		0,00 %	930.000	100,00%	2.965.750	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.513.150	11.662.500	5.070.000	43,47 %	6.592.500	56,53 %	46.443.150	90,16 %	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.249.339.564**	**1.608.366.350**	**543.954.277**	**33,82 %**	**1.064.412.073**	**66,18 %**	**2.705.385.287**	**83,26 %**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.900.764	1.590.451.350	543.954.277	34,20 %	1.046.497.073	65,80 %	2.636.946.487	82,90 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.438.800	17.915.000		0,00 %	17.915.000	100,00%	68.438.800	100,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**15.451.100**	**3.450.000**		**0,00 %**	**3.450.000**	**100,00%**	**15.451.100**	**100,00%**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.451.100	3.450.000		0,00 %	3.450.000	100,00%	15.451.100	100,00%	
	Administrasi Pendapatan Daerah	**10.522.800**	**2.085.000**		**0,00 %**	**2.085.000**	**100,00%**	**10.522.800**	**100,00%**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kewenangan Perangkat Daerah									
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.522.800	2.085.000		0,00 %	2.085.000	100,00%	10.522.800	100,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**71.043.050**	**26.567.500**	**3.626.000**	**13,65 %**	**22.941.500**	**86,35 %**	**67.417.050**	**94,90 %**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.523.050	5.567.500		0,00 %	5.567.500	100,00%	20.523.050	100,00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.520.000	21.000.000	3.626.000	17,27 %	17.374.000	82,73 %	46.894.000	92,82 %	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**504.613.900**	**162.350.445**	**114.312.100**	**70,41 %**	**48.038.345**	**29,59 %**	**390.301.800**	**77,35 %**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.543.000	1.385.750	1.381.000	99,66 %	4.750	0,34%	4.162.000	75,09 %	
	Penyediaan Peralatan dan	4.935.700	1.691.425		0,00 %	1.691.425	100,00%	4.935.700	100,00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perlengkapan Kantor									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.993.350	11.748.300	6.308.100	53,69 %	5.440.200	46,31 %	40.685.250	86,58 %	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.429.850	4.857.470	350.000	7,21 %	4.507.470	92,79 %	19.079.850	98,20 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	2.055.000	1.660.000	80,78 %	395.000	19,22 %	6.560.000	79,81 %	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.450.000	2.612.500	2.025.000	77,51 %	587.500	22,49 %	8.425.000	80,62 %	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.042.000	138.000.000	102.588.000	74,34 %	35.412.000	25,66 %	306.454.000	74,92 %	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**277.250.000**	**127.250.000**	-	**0,00 %**	**127.250.000**	**100,00%**	**277.250.000**	**100,00%**	
	Pengadaan Mebel	14.000.000	14.000.000							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.250.000	113.250.000							

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	150.000.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**124.172.300**	**31.431.100**	**20.479.888**	**65,16 %**	**10.951.212**	**34,84 %**	**103.692.412**	**83,51 %**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.150.000	5.787.500	760.000	13,13 %	5.027.500	86,87 %	22.390.000	96,72 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.222.300	12.443.600	11.719.888	94,18 %	723.712	5,82%	36.502.412	75,70 %	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	13.200.000	8.000.000	60,61 %	5.200.000	39,39 %	44.800.000	84,85 %	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**262.030.000**	**133.402.500**	**2.090.000**	**1,57 %**	**131.312.500**	**98,43 %**	**259.940.000**	**99,20 %**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	24.920.000	3.750.000		0,00 %	3.750.000	100,00%	24.920.000	100,00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.450.000	125.737.500	2.090.000	1,66 %	123.647.500	98,34 %	199.360.000	98,96 %	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	3.915.000		0,00 %	3.915.000	100,00%	15.660.000	100,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	20.000.000	100,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**13.273.595.500**	**2.144.085.050**	**1.541.534.175**	**71,90 %**	**602.550.875**	**28,10 %**	**11.732.061.325**	**88,39 %**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	**5.579.819.250**	**1.021.850.000**	**977.106.801**	**95,62 %**	**44.743.199**	**4,38%**	**4.602.712.449**	**82,49 %**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.975.400.000	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.975.400.000	100,00%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.604.419.250	1.021.850.000	977.106.801	95,62%	44.743.199	4,38%	2.627.312.449	72,89%	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**2.563.560.000**	**236.359.000**	**49.310.000**	**20,86%**	**187.049.000**	**79,14%**	**2.514.250.000**	**98,08%**	
	Pembangunan Gedung Terminal	1.855.000.000	50.625.000	-	**0,00%**	50.625.000	**100,00%**	1.855.000.000	**100,00%**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	708.560.000	185.734.000	49.310.000	26,55%	136.424.000	73,45%	659.250.000	93,04%	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**30.814.900**	**12.412.000**	**640.000**	**5,16%**	**11.772.000**	**94,84%**	**30.174.900**	**97,92%**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30.814.900	12.412.000	640.000	5,16 %	11.772.000	94,84 %	30.174.900	97,92 %	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**200.278.000**	**102.436.500**	**13.925.000**	**13,59 %**	**88.511.500**	**86,41 %**	**186.353.000**	**93,05 %**	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	167.278.000	99.436.500	13.925.000	14,00 %	85.511.500	86,00 %	153.353.000	91,68 %	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.000.000	3.000.000		0,00 %	3.000.000	100,00%	33.000.000	100,00%	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	**462.257.300**	**153.829.700**	**66.374.000**	**43,15 %**	**87.455.700**	**56,85 %**	**395.883.300**	**85,64 %**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	446.251.800	149.594.200	66.374.000	44,37 %	83.220.200	55,63 %	379.877.800	85,13 %	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	4.235.500		0,00 %	4.235.500	100,00%	16.005.500	100,00%	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**4.354.544.300**	**595.222.850**	**426.324.660**	**71,62 %**	**168.898.190**	**28,38 %**	**3.928.219.640**	**90,21 %**	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	4.354.544.300	595.222.850	426.324.660	71,62 %	168.898.190	28,38 %	3.928.219.640	90,21 %	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**82.321.750**	**21.975.000**	**7.853.714**	**35,74 %**	**14.121.286**	**64,26 %**	**74.468.036**	**90,46 %**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	82.321.750	21.975.000	7.853.714	35,74 %	14.121.286	64,26 %	74.468.036	90,46 %	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**761.135.150**	**173.769.225**	**57.235.000**	**32,94 %**	**116.534.225**	**67,06 %**	**703.900.150**	**92,48 %**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**249.336.900**	**56.310.875**	**11.055.000**	**19,63 %**	**45.255.875**	**80,37 %**	**238.281.900**	**95,57 %**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	249.336.900	56.310.875	11.055.000	19,63 %	45.255.875	80,37 %	238.281.900	95,57 %	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**511.798.250**	**117.458.350**	**46.180.000**	**39,32 %**	**71.278.350**	**60,68 %**	**465.618.250**	**90,98 %**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I *(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)*	REALISASI ANGGARAN SD 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144.000.000	36.000.000		0,00 %	36.000.000	100,00%	144.000.000	100,00%	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	367.798.250	81.458.350	46.180.000	56,69 %	35.278.350	43,31 %	321.618.250	87,44 %	

B. LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN KINERJA INSTANSI

Tabel 3.27

Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Triwulan 1 Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase capaian kinerja program perangkat daerah ('%)**	**100 %**	**4.602.208.414**	**100,0%**	**691.532.265**							**0,0%**	**691.532.265**	**0,00%**	**15,03 %**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)**	**100 %**	**87.785.700**	**30%**	**7.070.000**							**30%**	**7.070.000**	**30,00%**	**8,05%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	30.524.650		2.000.000							0	2.000.000	0,00%	6,55%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2.782.150									0	-	0,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2.965.750	1								1	-	50,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	51.513.150	4	5.070.000							4	5.070.000	40,00%	9,84%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)**	**95%**	**3.249.339.564**	**20%**	**543.954.277**							**20%**	**543.954.277**	**21,05%**	**16,74 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	27	3.180.900.764	27	543.954.277							27	543.954.277	100,00%	17,10 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	68.438.800	4								4	-	22,22%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	**100 %**	**15.451.100**	**25%**	**-**							**25%**	**-**	**25,00%**	**0,00%**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	15.451.100	1								1	-	25,00%	0,00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)**	**95%**	**10.522.800**	**20,0%**	**-**							**20,00 %**	**-**	**21,05%**	**0,00%**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4	10.522.800	1								1	-	25,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)**	**95%**	**71.043.050**	**20%**	**3.626.000**							**20%**	**3.626.000**	**21,05%**	**5,10%**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12	20.523.050	3								3	-	25,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5	50.520.000	1	3.626.000							1	3.626.000	20,00%	7,18%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	**95%**	**504.613.900**	**20%**	**114.312.100**							**20%**	**114.312.100**	**21,05%**	**22,65 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5	5.543.000	5	1.381.000							1	1.381.000	25,00%	24,91 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	8	4.935.700	8								2	-	25,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	46.993.350	2	6.308.100							2	6.308.100	100,00%	13,42 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	19.429.850	3	350.000							1	350.000	25,00%	1,80%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72	8.220.000	18	1.660.000							18	1.660.000	25,00%	20,19 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	30	10.450.000	7	2.025.000							7	2.025.000	23,33%	19,38 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	409.042.000	35	102.588.000							35	102.588.000	23,33%	25,08 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**95%**	**277.250.000**	**20%**	**-**							**20%**	**-**	**21,05%**	**0,00%**
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	**28**	14.000.000	**28**								28		**100,00%**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	7	113.250.000	2								2	-	28,57%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	150.000.000												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**95%**	**124.172.300**		**20.479.888**							**0%**	**20.479.888**	**0,00%**	**16,49 %**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1200	23.150.000	300	760.000							300	760.000	25,00%	3,28%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	48.222.300	6	11.719.888							6	11.719.888	25,00%	24,30 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	4	52.800.000	4	8.000.000							4	8.000.000	100,00%	15,15 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)**	**95%**	**262.030.000**	**20%**	**2.090.000**							**20%**	**2.090.000**	**21,05%**	**0,80%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	24.920.000	1								0,25	-	25,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	10	201.450.000	10	2.090.000							3	2.090.000	25,00%	1,04%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	15.660.000	9								9	-	23,68%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000	2								1	-	25,00%	0,00%
			4.602.208.414									**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**		77,41%	15,0261%
												Predikat kinerja		Tinggi	Sangat Rendah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan ('%)**	**52,70 %**	**13.273.595.500**		**1.541.534.175**								**1.541.534.175**	**0,00%**	**11,61 %**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan ('%)	**94,24 %**		**23,60%**								**23,60 %**	**-**	**25,04%**	**0,00%**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik ('%)**	**100 %**	**5.579.819.250**	**15%**	**977.106.801**							**15,0 %**	**977.106.801**	**15,00%**	**17,51 %**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapanjalan yang disediakan (jenis)	1	1.975.400.000									-	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara (Unit)	48	3.604.419.250	10	977.106.801							10	977.106.801	20,83%	27,11 %
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (Orang)**	**222795**	**2.563.560.000**	**30.930**	**49.310.000**							**30.930**	**49.310.000**	**13,88%**	**1,92%**
Pembangunan Gedung Terminal	Persentase capaian bangunan terminal ('%)	63,38 %	1.855.000.000		-							0,00 %	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi (unit)	3	708.560.000	3	49.310.000							0,75	49.310.000	25,00%	6,96%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan (Titik)**	**15**	**30.814.900**	**5**	**640.000**							**5**	**640.000**	**33,33%**	**2,08%**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	180	30.814.900	62	640.000							62	640.000	34,44%	2,08%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan (unit)**	**2733**	**200.278.000**	**1373**	**13.925.000**							**2.733**	**13.925.000**	**100,00%**	**6,95%**
	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	**2900**		**1.373**								**2.900**	**-**	**100,00%**	**0,00%**
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	3431	167.278.000	1.373	13.925.000							1.373	13.925.000	40,02%	8,32%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara (Unit)	11	33.000.000	11								9	-	81,82%	0,00%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan (Rekomendasi)**	**22**	**462.257.300**	**5**	**66.374.000**							**5**	**66.374.000**	**22,73%**	**14,36 %**
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan menejemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (Kali)	18	446.251.800	4	66.374.000							4	66.374.000	22,22%	14,87 %
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender(kali)	4	16.005.500	1								1	-	25,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)**	**302400**	**4.354.544.300**	**78.300**	**426.324.660**							**78.300**	**426.324.660**	**25,89%**	**9,79%**
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan yang disediakan (unit)	2	4.354.544.300	1	426.324.660							1	426.324.660	50,00%	9,79%
	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	27		27								27	-	100,00%	0,00%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio ijin trayek ('%)**	**0,011**	**82.321.750**	**0,01**	**7.853.714**							**0,01**	**7.853.714**	**100,00%**	**9,54%**
	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji ('%)	**5,76 %**										**0,00 %**	**-**	**0,00%**	**0,00%**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek) (Kali)	24	82.321.750	6	7.853.714							6	7.853.714	25,00%	9,54%
												-	-	**0,00%**	**0,00%**
			13.273.595.500	**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**										41,517826%	11,61%
				Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
												0,00 %	-	**0,00%**	**0,00%**
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase Kapal yang laik berlayar di laut ('%)**	**31,35 %**	**761.135.150**	**11,51%**	**57.235.000**							**0,00 %**	**57.235.000**	**0,00%**	**7,52%**
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau ('%)	**68,75 %**		**12,50%**								**0,00 %**	-	**0,00%**	**0,00%**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)**	**300**	**249.336.900**	**108**	**11.055.000**							**108**	**11.055.000**	**36,00%**	**4,43%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata (Kali)	24	249.336.900	6	11.055.000							6	11.055.000	25,00%	4,43%
	Jumlah kapal yang difasiltiasi pengurusan izin (1 tahun) (Unit)	250		75								75	-	30,00%	**0,00%**
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/Kg)**	**52825**	**511.798.250**	**13.206**	**46.180.000**							**13.206**	**46.180.000**	**25,00%**	**9,02%**
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara (Unit)	3	144.000.000	3								3	-	100,00%	0,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	24	367.798.250	6	46.180.000							3	46.180.000	12,50%	12,56 %
			761.135.150	**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**										0,00%	7,52%
				Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
			761.135.150		**57.235.000**		**-**		**-**		**-**				
		18.636.939.064		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**48,69%**	**12,289 %**
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

BAB 4 PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama triwulan 1 tahun 2024. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Triwulan 1 Tahun 2024, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 1 Tahun 2023 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 111,42 %.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi akuntabilitas keuangan mencapai 12,289%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
3. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintahan dapat ditekan/ menurun.

4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

2. SARAN

Walaupun demikian dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dan pengembangan pembangunan diperlukan adanya peran serta dari pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun badan usaha yang terlibat dalam bidang perhubungan.

Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan program – program Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 1 April 2024

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM, S.Sos, MM

NIP. 196511051987031015